

BAB I

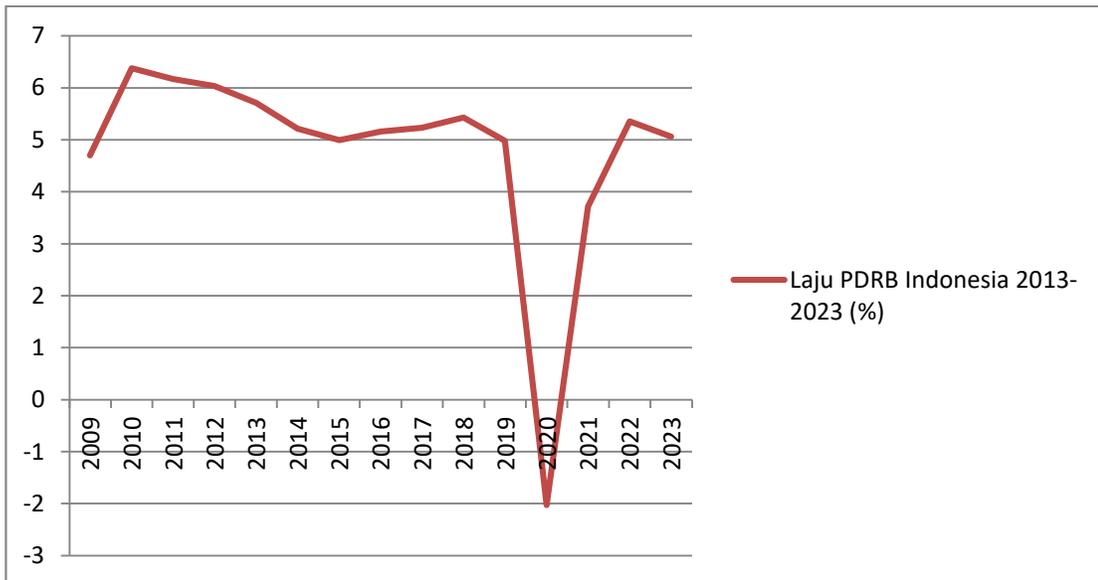
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah refleksi produktivitas suatu negara yang dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya dan kerjasama banyak pihak. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan dengan *spread effect*, yaitu secara meluas atau merata. Dinilai terdistribusi secara merata apabila dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat pula mengurangi angka kemiskinan, meningkatnya akses pendidikan serta meningkatkan standar kehidupan layak pada warga negaranya. Hal ini terungkap pada kasus yang dapat dijumpai di negara dunia ketiga, tipe praktik pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan dapat dilihat melalui dua pendekatan yaitu pendekatan melalui kapital dan kedua, melalui sumber daya manusia (SDM). Pada kasus yang ada di Indonesia, pendekatan melalui kapital menjadi pembicaraan yang pada akhirnya mengambil jalan tengah, dengan menerapkan sistem ekonomi pancasila yang menjadikan Indonesia dapat tergerus dalam arus kapitalisme global. Namun, pendekatan kedua tidak mudah untuk dilakukan karena akan terciptanya kesenjangan sosial ekonomi serta masalah politik (Malik, 2016). Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang menyandang nilai produktivitas, Indonesia menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada lingkup regional dan PDB secara nasional. Untuk menilai dinamika serta struktur ekonomi digunakanlah PDRB ADHB. Sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi (BPS 2023).

Krisis ekonomi global 2008 berdampak pada negara-negara di Asia termasuk Indonesia (Mutakin & Ridwan, 2020), namun tidak memberikan dampak yang berkepanjangan sebagaimana krisis yang terjadi pada 1998. Pasca krisis global yang melanda, pertumbuhan ekonomi mengalami pemulihan dengan cepat. Indonesia terus meningkatkan laju PDRB dengan berbagai kebijakan dan strategi dalam meningkatkan nilai produksi, namun faktor luar tetap akan berdatangan dan membuat

laju PDRB berfluktuasi. Pada 2013 untuk pertama kalinya Indonesia mengalami penurunan laju PDRB setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2008, ditunjukkan pada gambar 1.



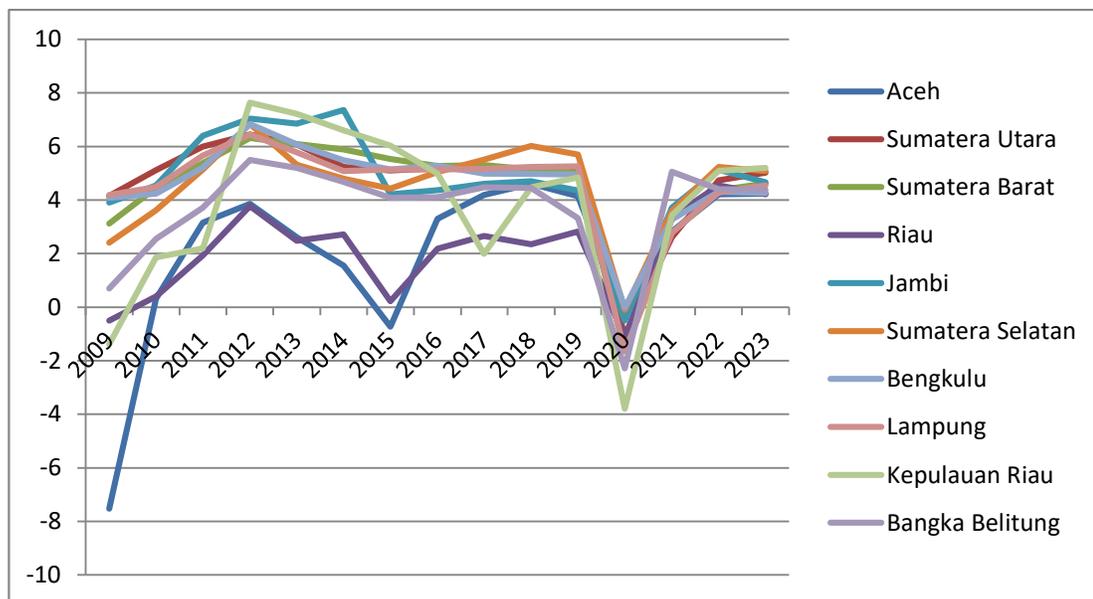
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 1. Laju PDRB Indonesia Pada Tahun 2009-2023

Pada gambar 1, PDRB Indonesia pada tahun 2009 hanya tumbuh di angka 4,7%. Hal itu dikarenakan pengaruh krisis global yang terjadi ketika Amerika Serikat mengubah kebijakan moneter terkait *subprime mortgage* dan berakibat pada negara-negara berkembang yang bergantung pada pasar global, termasuk Indonesia. *Capital outflow* terjadi pada saat itu diiringi terjadinya inflasi yang menyentuh angka 8,3%. Namun setelahnya, Indonesia dapat segera bangkit dari keterpurukan berkaca pada pengalaman krisis yang terjadi pada tahun 1998. Pada tahun 2013-2015, perekonomian Indonesia kembali melamban diakibatkan oleh jatuhnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan serta adanya perubahan UU mineral dan batubara/minerba (Ika, 2017). Bahkan pertumbuhan di pulau Sumatera dan Kalimantan melambat secara signifikan karena ketergantungan dua pulau tersebut pada penjualan komoditas ekspor. Pada tahun 2016-2018, PDRB mulai pulih dengan

adanya stabilitas dan kelonggaran kebijakan makro bergerak signifikan naik (Bank Indonesia, 2016). Pada tahun 2019-2020, laju PDRB jatuh secara dramatis hingga menyentuh angka -2,03% dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengguncang perekonomian global, dan kembali pulih pasca pandemi.

PDRB pulau Sumatera dan Kalimantan tersorot pada perlambatan pergerakan perekonomian pada tahun 2013-2015, namun 9 dari 10 provinsi di pulau Sumatera memperlihatkan pergerakan PDRB yang serupa dikarenakan ketergantungannya pada sektor pertambangan dan pertanian, dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 2. Laju PDRB Provinsi di Pulau Sumatera Pada Tahun 2009-2023

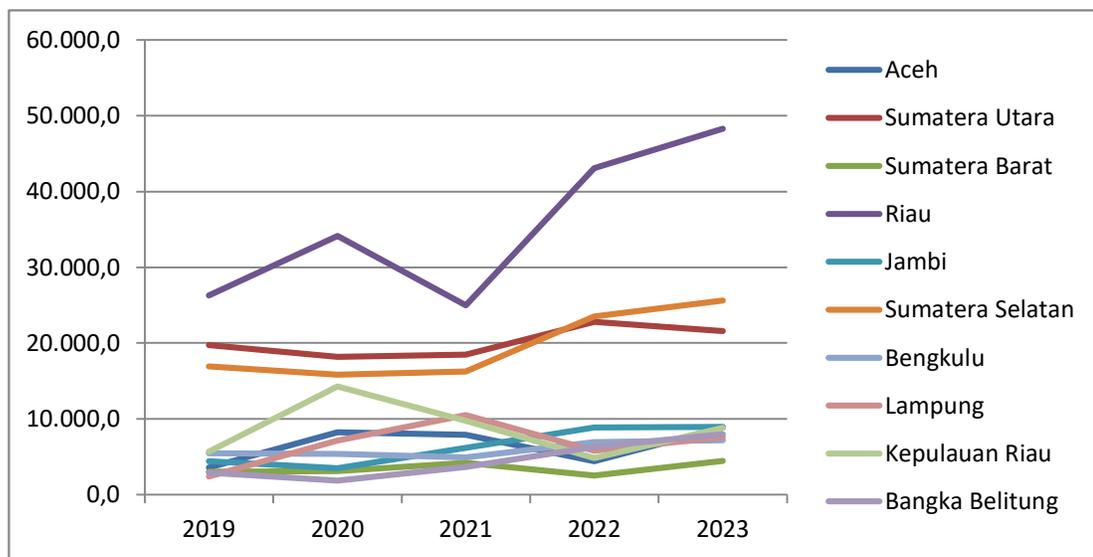
Pada gambar 2, laju PDRB di pulau Sumatera tertinggi berada di provinsi Kepulauan Riau dengan persentase 6,02% dan terendah adalah provinsi Aceh yang berada di angka -1,23% pada 2015. Berbeda dari provinsi lainnya, provinsi Jambi pada 2013-2014 masih didukung oleh pertambangan dan penggalian dalam jumlah produksi yang tinggi sehingga PDRB mengalami kenaikan. Grafik memperlihatkan bahwa 2013-2015, PDRB dari 9 provinsi melamban secara signifikan, dan kembali membaik pada tahun 2016-2018, berbeda dengan provinsi Kepulauan Riau yang

mengalami kejatuhan persentase pada 2017 dikarenakan konsumsi yang menurun dan realisasi investasi yang lamban (DPM, 2021). Pada 2019-2020, hal yang sama terjadi pada setiap provinsi di pulau Sumatera yang mengalami kejatuhan pada laju PDRB dikarenakan pandemi global Covid-19, kedalaman kontraksi perekonomian rata-rata berada di angka -1,19% tidak sedalam pulau Jawa di angka -2,51% berkat sumbangan sektor pertanian yang besar di pulau ini.

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam teori Keynesian, bahwa untuk mencapai struktur ekonomi yang baik, akumulasi modal dibutuhkan sebagai gagasan utama yang mempengaruhinya (Windayana & Darsana, 2020). Akumulasi modal tersebut berupa investasi swasta yang dapat dilihat dari PMA dan PMDN serta investasi pemerintah. Meningkatkan nilai investasi asing maupun domestik pastinya akan membawa dampak pada stok modal serta peningkatan produktivitas. Faktor produksi bersifat fundamental dalam proses tersebut, yang mana pada kemudian hari akan tercipta lapangan kerja dalam menekan angka pengangguran (Rofii & Ardyan, 2017).

Dalam temuan penelitian oleh (Bawinti et al., 2018), dinyatakan bahwa investasi berperan sebagai modal pembangunan yang strategis dan fundamental, dikatakan strategis karena tahapan mutlak dalam alokasi sumber daya untuk pembangunan yang harus dilalui oleh setiap sektor ekonomi. Sedangkan fundamental jika modal dialirkan tepat sasaran, investasi tersebut akan menghasilkan ekonomi yang kuat. Dalam penelitian yang melibatkan 59 negara berkembang dan dalam rentang tahun 1990-2019, didasari oleh teori Keynesian membuktikan bahwa keseimbangan pendapatan nasional dirumuskan dengan $Y = C + I + G + X - M$ secara umum didukung, penelitian yang dilakukan oleh (Ahuja & Pandit, 2020) juga menggunakan teori Keynesian berfokus pada pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas perdagangan, investasi, inflasi, dan belanja publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pulau Sumatera masih menjadi tujuan utama investasi swasta posisi kedua setelah pulau Jawa pada data tahun 2023, dimana realisasi investasi swasta di Pulau Sumatera tercatat pada angka 20,1% (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini dikarenakan PDRB Jawa dan Sumatera masih memimpin dibandingkan dengan pulau lainnya. Dalam investasi pemerintah dan swasta terdapat dua jenis investasi, yaitu investasi jangka pendek (<1 tahun) yang menggunakan dana APBN yang belum terpakai menjadi manajemen kas, dan investasi jangka panjang (>1 tahun) yang berasal dari swasta dan pemerintah untuk manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lain yang berkelanjutan (KEMENKEU, 2010). Berikut investasi swasta yang direalisasikan dalam periode 2021-2023.

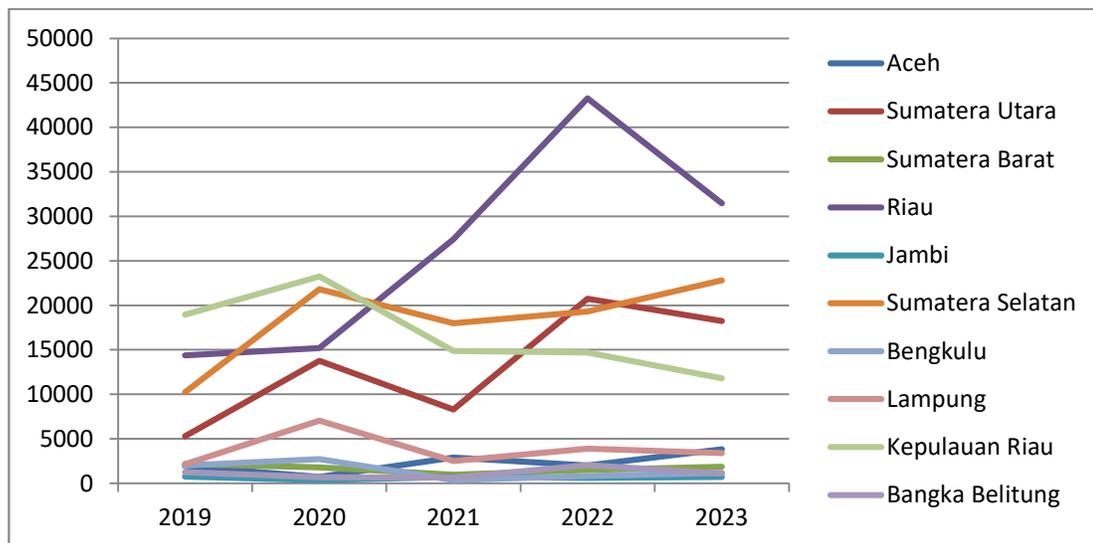


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 3. PMDN Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

Pada gambar 3, Provinsi Riau memiliki PMDN yang berada jauh di atas provinsi lainnya dengan rata-rata 35.342,6 miliar rupiah selama 5 tahun. Provinsi kedua yang memiliki PMDN tertinggi adalah provinsi Sumatera Utara dengan rata-rata sebesar 20.157,2 miliar rupiah, dan disusul dengan posisi ketiga yaitu provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah rata-rata 19.628,2 miliar rupiah dalam lima tahun.

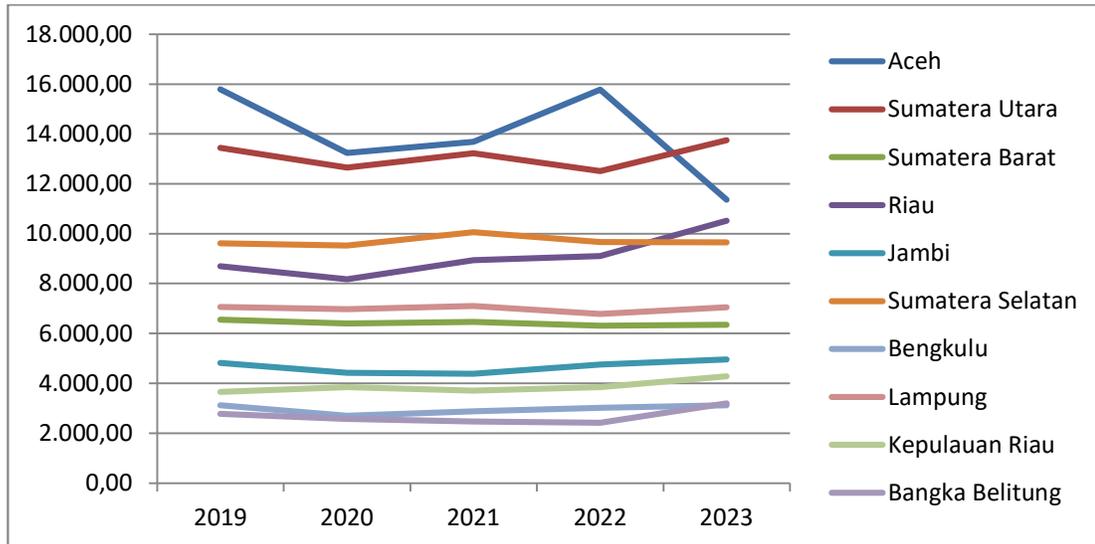
Sedangkan tujuh provinsi lain memiliki rata-rata yang berada di bawah 15.000 miliar rupiah per tahun dalam lima tahun. Berbeda dengan investasi yang berasal dari domestik, berikut adalah gambaran investasi swasta yang berasal dari investor asing.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 4. PMA Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

Gambar 4 menunjukkan pergerakan investasi asing selama lima tahun di provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi dengan rata-rata tertinggi berada di Provinsi Riau sejumlah 26.343,8 miliar rupiah, posisi kedua Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata 18.414,88 miliar rupiah, dan ketiga berada di Provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata 16.716,4 miliar rupiah. Provinsi Sumatera Utara memiliki rata-rata 13.244,2 miliar rupiah, sedangkan 6 provinsi lainnya di bawah angka 5.000 miliar rupiah. Berbeda dengan relisasi investasi swasta yang didasarkan pada profit, investasi pemerintah dalam bentuk belanja daerah dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024 (diolah)

Gambar 5. Belanja Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

Pada gambar 5 menunjukkan bahwa belanja daerah di setiap provinsi cenderung stabil dan berbeda tergantung pada kemampuan keuangan daerah, urgensi, dan peluang yang ada. Rata-rata belanja daerah tertinggi berada pada Provinsi Aceh dengan angka 14.621,69 miliar rupiah, namun pada 2023 mengalami penurunan dikarenakan PAD yang menurun pada tahun sebelumnya, 2022. Posisi kedua yaitu Provinsi Sumatera Utara sejumlah 13.034,09 miliar rupiah. Posisi ketiga yaitu Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata 9.613,20 miliar rupiah.

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan (Adeleye, et al., 2017), pertumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh investasi meningkat, namun tidak menyentuh angka kesejahteraan yang tinggi. Dalam kasus benua Afrika, permasalahan kesenjangan belum dapat diatasi dengan investasi saja. Salah satu problema yang dihadapi oleh wilayah tersebut berupa ketidakmampuan untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan rapuhnya institusi (Kalimeris et al., 2020). Mengingat bahwa Afrika juga termasuk dalam negara dunia ketiga, melalui teori Keynesian dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan faktor produksi di dalamnya, dikarenakan

akumulasi modal tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber daya manusia atau dikenal dengan tenaga kerja.

Dalam penelitian (Agustini & Kurniasih, 2017), lapangan kerja yang meluas diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang seimbang, maka akan berpotensi untuk menambah tingkat produktivitas dan menaikkan angka PDRB di Provinsi Kalimantan Barat. Kuncoro (2002) mendefinisikan penyerapan tenaga kerja sebagai tingkat pemanfaatan tenaga kerja dalam suatu perekonomian, yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk yang bekerja. Maka dari itu, perlu dilihat pengaruh antara investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan investasi dari swasta terhadap penyerapan tenaga kerja tersebut serta dampaknya terhadap laju PDRB provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Belanja daerah, PMDN, PMA, Jumlah Penduduk Bekerja, dan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2014-2023?
2. Apakah belanja daerah, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA) berpengaruh terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Sumatera melalui jumlah penduduk bekerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab permasalahan dan rumusan masalah penelitian sebelumnya yang timbul dari fenomena sosial. Tujuan khusus dari penelitian ini merupakan:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perkembangan belanja daerah, PMDN, PMA, Jumlah Penduduk Bekerja, dan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2014-2023.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui adanya pengaruh belanja daerah, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA) terhadap PDRB provinsi-provinsi di pulau Sumatera melalui jumlah penduduk bekerja.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini berupa kontribusinya dalam pengembangan teori seputar determinan yang berpengaruh pada kesempatan kerja dan dampaknya terhadap PDRB suatu wilayah, khususnya Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pengembangan baru bagi pengukuran pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia maupun negara lainnya. Selain itu, dengan adanya dasar statistik yang kuat, penelitian bisa bermanfaat sebagai referensi bagi para peneliti di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

Temuan dari penelitian ini diperlukan sebagai pemberi manfaat yang bersifat praktis bagi pemangku kebijakan di Indonesia, khususnya otonomi di provinsi yang ada di pulau Sumatera maupun bagi pihak swasta yang ingin menanamkan modalnya kepada pemerintah. Hasil dan rekomendasi pada penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan pada pengembangan realisasi maupun pembuatan kebijakan bagi pihak yang berwenang.